

**REFLEKSI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM MANIFESTASI
GOOD GOVERNANCE****Nufaisa¹, Ade Irma Suryani Lating², Mohammad Dliyaul Muflihin³***Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*nufaisa@uinsby.ac.id¹, ade.irma@uinsby.ac.id², mdliyaulmuflihin@uinsby.ac.id³**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi standar akuntansi pemerintahan dalam mewujudkan *good governance* di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya dilihat dari segi kompetensi sumber daya manusianya. Materi penelitian ini terdiri dari karakteristik laporan keuangan basis akrual, serta prinsip – prinsip *good governance*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Terdapat tiga informan yang dipilih yakni camat, bagian umum dan kepegawaian, serta bagian keuangan. Pendekatan interpretif digunakan untuk mendeskripsikan pemahaman yang mendalam dari proses standar akuntansi pemerintahan dilihat dari segi kompetensi sumber daya manusianya guna mewujudkan *good governance* di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. Hasil dari penelitian ini bahwa secara umum standar akuntansi pemerintahan basis akrual telah dilakukan dengan baik meskipun dalam beberapa hal perlu diadakan perbaikan dan pembenahan lebih lanjut.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Good Governance*

Abstract

This study aims to understand the implementation of government accounting standards in realizing good governance in Gunung Anyar District, Surabaya in terms of human resource competence. The research material consists of the characteristics of accrual-based financial statements, as well as the principles of good governance. This research is a qualitative research. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation studies. There were three informants selected, namely the sub-district head, the general and staffing section, and the finance section. An interpretive approach is used to describe a deep understanding of the process of government accounting standards in terms of the competence of its human resources to realize good governance in Gunung Anyar District, Surabaya. The results of this study are that in general accrual basis government accounting standards have been carried out well although in some cases further improvements and improvements are needed.

Keywords: *Government Accounting Standards, Human Resources Competence, Good Governance*

PENDAHULUAN

Perkembangan di Indonesia khususnya pada akuntansi sektor publik berkembang pesat sejalan dengan reformasi dalam implementasi kebijakan pemerintah dan munculnya era desentralisasi fiskal dengan fokus pada pemerintah daerah dan lokal. Gempuran globalisasi juga menuntut daya saing dari semua negara, serta dari pemerintah daerah, yang diharapkan menjadi lebih kompetitif melalui kemandirian pemerintah yang lebih besar.

“*New Public Management (NPM)*” adalah fenomena global yang ditujukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi organisasi publik, meningkatkan daya tanggap dan meningkatkan akuntabilitas. Implementasi NPM di Indonesia dimulai melalui perubahan birokrasi pada sektor keuangan, yang menghasilkan tiga peraturan yaitu – “UU No. 17/2003 Keuangan Negara, UU No. 1/2004 Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 Tinjauan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara”, yang mengantarkan era baru pengelolaan keuangan publik. Hal ini diikuti dengan diperkenalkannya Standar Akuntansi Publik No. 24 tahun 2005 'Dari basis kas kebasis akrual' dan Standar Akuntansi Publik No. 71 tahun 2010 'Ke basis akrual'. Dalam banyak hal, manajemen keuangan publik yang lebih transparan dan kemampuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi publik sangat diinginkan (Kristiawati, 2015).

Pada era peningkatan pengelolaan sektor publik yang terjadi sekarang ini, kebutuhan akan transparansi dalam pengelolaan dana organisasi publik di tingkat pusat dan daerah semakin meningkat. Penyerapan anggaran yang rendah merupakan salah satu penyebab kinerja pemerintah dinilai gagal dalam hal akuntabilitasnya (Basri, 2021). Akuntabilitas bisa dimaknai seperti pertanggungjawaban atas kesuksesan maupun kejatuhan dari tujuan organisasi

agar dapat memenuhi kebutuhan yang sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan ukuran-ukuran penilaian yang diterapkan dengan teratur, suatu fenomena yang mengindikasikan semakin meningkatnya kebutuhan rakyat terkait transparansi dalam akuntabilitas pendanaan sektor publik terhadap lembaga pemerintah pusat dan daerah.

Sasaran anggaran yang tepat dapat dilihat dari APBN dan APBD yang sudah ada dalam pengelolaan dana sebagai bentuk dari akuntabilitas publik (Dewi, 2021). Dalam hal ini, pembentukan akuntabilitas publik perlu diimplementasikan dalam sistem dan standar akuntansi pemerintah yang berguna dalam mewujudkan pengelolaan dana organisasi publik yang baik (Juwita, 2013). Selain itu pada pembentukan akuntabilitas yang tepat perlu juga diperhatikan mengenai penyajian laporan keuangan, kualitas pengawasan BPD, kompetensi aparatur pemerintah, sistem keuangan desa (SISKEUDES), dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang baik (Triyono, 2019).

Pengelolaan sistem pendanaan yang baik sering diartikan sebagai “manajemen pembangunan yang bertanggung jawab” berdasarkan pada norma-norma Pancasila serta pada kebutuhan pasar, perhitungan risiko investasi keuangan, pengurangan tingkat penyalahgunaan keuangan dan administrasi dan juga pertanggungjawaban fiskal (Singkali dan Widuri, 2014). Akuntabilitas hendaknya lebih diutamakan untuk tata Kelola yang baik (Junjuran, 2020).

Manossoh (2015) menerangkan bila pengenalan tata kelola pemerintah yang baik mutlak diperlukan karena harus membawa negara Indonesia keluar dari keterpurukan. Salah satu hal yang paling mendesak guna memenuhi kebutuhan pengelolaan sistem pemerintahan yang baik adalah reformasi sektor keuangan. Untuk mewujudkan akuntabilitas pada instansi pemerintahan diperlukan aplikasi sistem keuangan desa yang dinamakan sistem

keuangan desa atau yang biasa disebut dengan SISKEUDES agar tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud (Maharani & Akbar, 2020).

Tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan perubahan baru dan mendasar dalam paradigma pemerintahan, suatu sistem yang memberdayakan kompetisi regional, nasional dan internasional, bukannya pemerintah daerah yang terus-menerus bergantung pada pemerintah pusat. Sistem pemerintahan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan perubahan di bidang akuntansi publik. Hal ini karena, melalui proses akuntansi, informasi keuangan dihasilkan untuk para pemangku kepentingan yang berbeda. Selain tata Kelola yang pemerintahan yang diperlukan juga adanya sistem pengendalian intern pemerintah pada penyusunan laporan keuangan (Amelia & Halim, 2021). Perubahan akuntansi harus dibangun di atas fondasi yang kokoh dari keberadaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

SAP adalah persyaratan yang mengikat secara hukum untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah telah mempercayakan pekerjaan penyusunan standar-standar tersebut kepada suatu dewan penyusun standar independen yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Pasal 36.1 UU No. 17 tentang Keuangan Negara mengamanatkan penerapan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban untuk jangka waktu sampai dengan lima tahun (Lamonisi, 2016).

Berkenaan dengan kualitas pelaporan keuangan daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pertimbangan yang perlu diperhatikan adalah kapasitas personil yang terlibat dalam kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SAP yang berlaku.

Penerapan SAP sangat penting untuk mencapai hasil pelaporan keuangan daerah yang lebih berkualitas (relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami). Agar pemerintah daerah dapat mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka diperlukan personil yang kompeten yang terlatih di bidang akuntansi, rutin mengikuti diklat dan memiliki pengalaman di bidang keuangan. Hal ini diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Personil (SDM) yang kompeten akan memiliki pemahaman yang baik tentang logika akuntansi. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang juga perlu diperhatikan ialah yang baik di dalam penyajian laporan keuangannya yang dapat mempengaruhi opini yang sudah diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Daerah (Putra, 2021).

Standar Akuntansi Pemerintahan yang ada di beberapa kota di Indonesia, termasuk Surabaya, yang telah mengadopsi standar akuntansi akrual, menghadapi kendala pada tahap awal penerapan standar akuntansi akrual, terutama dalam hal keterampilan sumber daya manusia. Pentingnya pelaksanaan akuntansi sektor publik yang baik akan membawa pengaruh bagi instansi Pemerintahan (Belinda, 2021). Selain itu, topik akuntansi sektor publik masih menjadi topik terbanyak yang paling sering diteliti dikarenakan masih adanya beberapa kendala akan laporan keuangan (Rizki, 2019).

Kota Surabaya khususnya Kecamatan Gunung Anyar Surabaya merasakan hal yang sama pada awal penerapannya. Melalui wawancara dengan K.A.K, Ibu Ratna Puspitosari HW, SP, Bagian Keuangan, Seba.SAC, mengatakan, "Kecamatan Gunung Anyar Surabaya memperkenalkan IPSAS berbasis akrual sejak tahun 2015, dan pada awalnya ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti sumber daya manusia, namun Kecamatan Gunung Anyar Surabaya telah menunjukkan bahwa memperkenalkan

standar akuntansi pemerintahan yang baru untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, terutama pengenalan akuntansi akrual, yang merupakan sesuatu yang baru diterapkan pada pemerintah pusat, yang berperan penting dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.”

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Refleksi Standar Akuntansi Pemerintah dalam Manifestasi *Good Governance*”**.

KAJIAN PUSTAKA

***New Public Management Theory* (Teori NPM)**

Teori tentang “New Public Management (NPM)” merupakan pandangan manajemen publik terkini yang diterapkan guna menggambarkan perkembangan pengelolaan sektor publik. Asal mula dari teori ini membahas tentang rasa tidak puas dari warga negara terkait kemampuan negara, yang dinilai kurang efisien serta kurang efektif untuk bisa mengelola sumber daya dengan baik. Rasa tidak puas tersebut merupakan akibat dari meningkatnya utang publik, pajak yang meningkat, dan kesejahteraan ekonomi yang menurun (Buhr, 2010).

Akuntansi Sektor Publik

“Akuntansi Sektor Publik” merupakan pemahaman tata cara atau aturan terkait identifikasi, penilaian, penulisan, serta pelaporan proses jual beli yang dilakukan oleh suatu badan usaha dan lembaga (seperti pemerintahan negara, organisasi masyarakat, serta kelompok-kelompok lainnya) untuk menginformasikan pengambilan keputusan ekonomi (Halim, 2018).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

SAP adalah persyaratan yang mengikat secara hukum untuk

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah telah mempercayakan pekerjaan penyusunan standar-standar ini kepada suatu komisi penetapan standar yang independen sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden tentang Komisi Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Pasal 36.1 UU No. 17 tentang Keuangan Negara mengamanatkan penerapan basis akrual dalam pengungkapan dan pengukuran pendapatan dan beban untuk jangka waktu sampai dengan lima tahun (Lamonisi, 2016).

Kompetensi Sumber Daya Manusia

McAshan (dalam Sudarmanto, 2009) menyatakan kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang merupakan bagian dari diri seseorang sehingga ia dapat mencapai munculnya perilaku kognitif, emosional dan psikomotorik. Menurut Werther dan Davis (dalam Sutrisno, 2012:4), sumber daya manusia adalah karyawan yang siap, mampu dan penuh perhatian untuk mencapai tujuan organisasi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi individu yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sifat-sifat kepribadian yang secara langsung mempengaruhi kinerja dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Good Governance

Tata kelola secara umum didefinisikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindungi. Tata kelola mencakup tiga (3) bidang yaitu: nasional/pemerintah, swasta/bisnis dan masyarakat (Sedarmayanti, 2012).

UNDP (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa) menambahkan bahwa ciri-ciri Tata Kelola pemerintahan yang baik mencakup: partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus,

pemerataan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, dan visi strategis sebagai karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif interpretatif (Moleong, 2011). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendalami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Secara kasar, penelitian ini bersifat alamiah dan menggunakan berbagai metode alamiah dengan mendeskripsikan subjek dalam konteks tertentu berupa kata-kata dan Bahasa.

Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer mengacu pada data yang diperoleh langsung dari informan melalui metode wawancara. Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti sumber internet, buku dan dokumen balai desa, dimana tidak ada interaksi langsung dengan peneliti. Dalam penelitian ini, tiga informan yang terlibat dalam refleksi Standar Akuntansi Pemerintahan untuk *Good Governance* di Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, diidentifikasi untuk mengumpulkan data primer.

Tabel 1. Daftar Informan

Informan	Jabatan
1. Bapak Dewanto K. Legowo	Camat
2. Ibu Fetty Fatimah	A. Sub. Bag. Umum dan Kepegawain
3. Ibu Ratna Puspitosari	KA. Sub. Bag. Keuangan

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan observasi dan wawancara. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek atau subjek penelitian sebagai sumber data penelitian. Dalam penelitian ini, kegiatan penelitian akan dilakukan di kecamatan Gunung Anyar, Surabaya selama kurang lebih 2-3 minggu, dan akan

dilakukan observasi partisipan untuk mengamati kegiatan akuntan dalam bidang pengelolaan keuangan. Wawancara kemudian akan dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab untuk mendapatkan informasi tentang topik tertentu. Metode ini akan dilakukan antara peneliti dengan informan yang telah teridentifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Seperti halnya pasal 1(8)Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 yang mengharuskan semua instansi pemerintah untuk menggunakan basis latihan SAP dengan tujuh komponen pada tahun 2015, Kabupaten Gunung Anyar sendiri telah memutuskan untuk menerapkan komponen

-komponen berikutini pada tahun 2015:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Penerapan SAP berbasis akrual, banyak kendala yang ditemui, seperti kurang pemahannya staf dalam menyusun Laporan Keuangan. Hal ini dipertegas sendiri oleh Ibu Ratna Puspitosari, HW, SP beliau selaku KA Sub Bagian Keuangan yang didapat dari wawancara, menyatakan bahwa:

“Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan Negara”.

Selain itu beliau mempertegas bahwasanya setiap kendala pasti ada solusinya. Dalam hal ini solusi yang dimiliki Pemerintah ialah diadakannya sosialisasi atau *training*. Beliau menjelaskan sosialisasi yang dimaksud ialah:

“Sosialisasi tentang basis akrual jadi setiap tahun saya beserta bendahara baru melakukan sosialisasi atau training jadi semua bagian keuangan dikumpulkan di Inspektorat Pemerintah Kota Surabaya. Sudah sering dilaksanakan Bintek atau pelatihan, untuk yang saya ketahui dan saya ikuti. Karena pada pelaksanaannya nanti akan menimbulkan kesulitan dibanding dengan basis kas, jadi persiapanyang kita lakukan harus lebih baik, karenakalau tidak mempersiapkan sejak awal akan terasa lebih susah. Niat pemerintah itu ke depan harus lebih baik dari sebelum-sebelumnya, jadi dari pihak kita hanya mengikuti dan menaati saja”.

Dan terbukti dengan adanya sosialisasi, bagian keuangan sejauh ini sudah menunjukkan kinerjanya lebih baik setidaknya kerumitan itu sudah dapat teratasi, sehingga bagian keuangan dapat mengerjakan laporan keuangannya sesuai dengan SAP basis akrual. Selain itu dalam proses penerapannya SAP basis akrual ini juga memiliki kelebihan serta kekurangan, hal itu dirasakan oleh Ibu Ratna sendiri dalam proses pelaksanaan SAP basis akrual, yang menyatakan bahwa:

“Kelebihannya ya itu dengan adanya basis akrual ini dapat mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan kekurangannya mungkin dalam beberapa masalah aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasi antara lain (1). penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat. (2). Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi. (3). Dalam perbandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya administrasi menjadi lebih mahal. (4). Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan”.

Beberapa pernyataan beliau di atas menguatkan pandangan bahwa dengan adanya standar akuntansi pemerintahan basis akrual ini mampu membawa kinerja bagian keuangan ke arah yang lebih baik dengan merujuk pada karakteristik kualitatif laporan keuangan berbasis akrual yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Akan tetapi dilihat dari pernyataan beliau ada beberapa karakteristik yang masih belum sesuai atau tepat seperti dapat dibandingkan di mana makna dari dapat dibandingkan ialah perbandingan secara internal yang dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Ratna, bahwa: *“Dalam perbandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit”.* Walaupun begitu untuk karakteristik yang relevan di Kecamatan Gunung Anyar sudah dapat dikatakan relevan, seperti yang diungkapkan Bapak Dewanto K. Legowo, Ap. S.Sos selaku Bapak Camat yang didapat melalui wawancara dengan peneliti, beliau menyatakan bahwa:

“Sejauh ini dalam proses pelaporannya tepat waktu walaupun terlambat tidak sampai melebihi batas waktu yang ditentukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga saya sebagai camat secara cepat mampu mengambil keputusan ke depannya”.

Pelaporan keuangan yang ada di Kecamatan Gunung Anyar juga sudah bisa dikatakan andal, seperti yang dipaparkan oleh Ibu Ratna, sebagai berikut:

“Pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi merupakan dasar bagi kinerja yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan. Personel yang tidak memiliki kompetensi tidak dapat melaksanakan pekerjaannya secara efisien, efektif dan ekonomis. Dalam hal ini, pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tersampaikan tepat waktu dan waktu serta tenaga akan terbuang sia-sia. Personel yang kompeten dapat menghemat waktu yang dihabiskan untuk pelaporan keuangan. Hal ini dikarenakan personil tersebut sudah memiliki pengetahuan tentang apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan yang dihasilkan tepat waktu. Semakin cepat laporan keuangan disampaikan, maka keputusan yang lebih baik dapat dibuat.

Hasil kapasitas sumber daya manusia yang diperoleh peneliti selama proses implementasi standar akuntansi pemerintahan dengan menggunakan

dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut. Tujuan umum pelaporan keuangan dengan basis akrual mempunyai peran akuntabilitas dan peran informatif, sehingga laporan keuangan dapat memberikan informasi kepada pengguna. Dengan laporan keuangan berbasis akrual, pengguna dapat melakukan penilaian atas kinerja keuangan, posisi keuangan, aliran arus kas suatu entitas, kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan, regulasi, hukum dan perjanjian kontrak. Laporan keuangan berbasis akrual juga dapat membantu pengguna internal dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan sumber daya dalam menjalankan suatu usaha”.

Dari pernyataan Ibu Ratna selaku KA Sub Bagian Keuangan di Kecamatan Gunung Anyar bahwa dalam laporan keuangan basis akrual dapat dikatakan andal karena di dalamnya terdapat informasi laporan keuangan yang nantinya bisa diambil keputusan tentang penggunaan sumber daya serta dapat melakukan penilaian atas kinerja.

akuntansi akrual di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. Cabang keuangan Otoritas Pelabuhan adalah bagian dari fungsi sekretaris distrik departemen keuangan. Bagian ini kemudian menyajikan fungsi dan informasi lainnya :

1. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan rencana program dan petunjuk teknis sektor keuangan.
2. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan program sesuai dengan petunjuk teknis sektor keuangan.
3. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan organisasi sektor keuangan lainnya.
4. Penyiapan bahan pengawasan dan pemantauan sektor keuangan.
5. Menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaantugas.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten

Pada proses pelaksanaan basis akrual tersebut beliau dibantu oleh tiga bendaharanya diantaranya satu bendahara dan dua pembantu bendahara. Beliau sudah bekerja di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya sejak tahun 1998 dan pernah bekerja di Bank BTPN dibidang yang sama selama kurang lebih tiga tahun. Latar belakang pendidikannya ialah beliau merupakan lulusan S1 Pertanian dan S2 Ilmu Administrasi Negara, sedangkan tiga bendaharanya lulusan SMA.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab penyajian data ada beberapa poin yang penting dalam kompetensi sumber daya manusia yang ada pada Kecamatan Gunung Anyar diantaranya pengetahuan, latar belakang pendidikan, ketrampilan, karakteristik pribadi serta pengalaman.

Diantara beberapa hal tersebut yang paling penting untuk dianalisis ialah latar belakang pendidikan beliau, dimana beliau merupakan lulusan S1 Pertanian dan S2 Ilmu Administrasi Negara, terlihat jelas bahwa latar belakang beliau tidak sesuai dengan jabatan yang dipertanggung jawabkannya yakni KA Sub Bagian Keuangan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Dewanto K. Legowo, Ap. S.Sos selaku Bapak Camat di Kecamatan Gunung Anyar yang didapat melalui wawancara dengan peneliti, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau menurut saya bagian keuangannya sendiri memang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan jabatan yang dipertanggung jawabkannya, karena memang di berbagai instansi pemerintahan memang seperti itu akan tetapi semangat, kompetensi, pengetahuannya yang mereka punya itu yang membuat kinerja mereka lebih baik dari hari ke hari. Dan untuk mengenai kompetensi sumber daya manusia yang ada pada KA Sub Bag Keuangan sendiri saya nilai cukup baik beliau memang bukan lulusan akuntansi akan tetapi pengetahuan, ketrampilan, kemampuan serta pengalaman yang beliau punya menjadikan laporan keuangan yang

ada di Kecamatan bisa dipertanggung jawabkan dan memenuhi karakteristik laporan keuangan yakni relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Untuk karakter pribadi beliau, beliau merupakan orang bertanggung jawab dan profesional dalam menjalankan tugas sebagai KA Sub Bagian Keuangan”.

Pernyataan dari Bapak Camat diperkuat oleh Ibu Fetty Fatimah, SE. MM selaku KA Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, di mana bagian keuangan mempunyai pengalaman, ketrampilan serta pribadi yang cukup baik, yang menyatakan bahwa: “Untuk kompetensi pembuat laporan keuangan basis keuangannya ya, karena rata-rata background pegawai yang di sini itu tamatan yang bukan akuntan. Tapi adajuga beberapa orang yang tamatan pendidikan akuntansi dan juga ekonomi. Tapi di awal kita bimbing dan latih mereka dari awal untuk memahami basis akrual ini. SDM yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan akan tetapi berjalannya waktu sejauh ini mereka sudah membuktikannya dengan cukup baik, darisegi pengetahuan, ketrampilan serta sikapnya pula. Beliau merupakan orang yang penuh semangat dalam menjalankan pekerjaannya. Dan terlebih walaupun beliau bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi tapi sebelumnya beliau sudah berpengalaman di bidang yang sama di Bank BTPN. Dan untuk masa kerja di Kecamatan ini sendiri beliau sudah dari tahun 1998 hingga sekarang bersamakami”.

Keterampilan berbeda dengan pengetahuan meskipun sama - sama dapat menentukan tingkat kualitas SDM. Keterampilan yang dimiliki beliau di Kecamatan Gunung Anyar dalam hal melakukan praktik akuntansi berbasis akrual sudah dirasa cukup.

Pada aspek kepribadian seseorang dapat mempengaruhi lingkungannya. Dalam hal ini beliau menunjukkan rasa semangatnya dalam perubahan basis akuntansi secara baik dan terus berusaha untuk memahaminya dengan melakukan pelatihan – pelatihan. Dan beliau juga selalu mengarahkan energi positif pada 3 bendaharannya agar laporan keuangan tersebut mampu diselesaikan tepat waktu dan mampu dipertanggungjawabkan, selain itu beliau dikenal sebagai orang yang ramah. Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman terlebih dalam bidangnya. Walaupun beliau bukan tamatan akuntansi beliau pernah mempunyai pengalaman pekerjaan di bidang yang sama di Bank BTPN selama kurang lebih 3 tahun.

Dari beberapa pernyataan tersebut ada hal menarik peneliti yakni hal yang menegaskan bahwa di berbagai Instansi Pemerintahan memang banyak sekali pegawai dengan latar belakang yang berbeda dari jabatannya. Seakan - akan hal tersebut terkesan masih dibiarkan berlarut – larut. Akan tetapi memang latar belakang pendidikan tidak menentukan kompetensi yang paling baik jikalau memang pegawai tersebut mempunyai komitmen yang tinggi maka pekerjaannya akan terlihat baik pula. Dalam hal pengetahuan bagian keuangan cukup mengerti akan SAP basis akrual, hal ini dapat dibuktikan melalui wawancara peneliti dengan Ibu Ratna, dimana peneliti menanyakan pemahaman beliau terkait SAP basis akrual, beliau menyatakan bahwa SAP basis akrual ialah: *“Standar akuntansi pemerintah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya*

diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat”.

Namun, situasinya sedikit berbeda: ketika peneliti bertanya tentang laporan tren pendapatan dan pengeluaran keuangan, dia mengaku tidak memahami implikasi dari laporan ini. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa bagian keuangan belum memahami prinsip-prinsip akuntansi akrual dari SAP. Oleh karena itu, ketika menerapkan SAP berbasis akrual, maka ketika menerapkan SAP berbasis akrual, maka bagian keuangan harus memahami prinsip-prinsip akuntansi akrual dari SAP tersebut. Oleh karena itu, ketika menerapkan SAP berbasis akrual, diharapkan memiliki kompetensi sumber daya manusia yang baik, karena peran sumber daya manusia penting untuk penyusunan laporan keuangan yang berkualitas tinggi dan penyusunnya sudah familier dengan SAP.

Sebaik apa pun standar akuntansi pemerintah, sulit untuk mendapatkan pelaporan keuangan yang berkualitas jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang andal. Standar tersebut ditetapkan dengan undang-undang dan pemerintah daerah harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang andal untuk mengimplementasikan standar akuntansi pemerintah tersebut. Mereka perlu memahami permasalahan penyusunan laporan keuangan dan sosialisasi standar akuntansi pemerintah.

Good Governance

Di Kegubernuran Gunung Anyar, banyak upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan terhadap pemerintah dan untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang disebut tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan persyaratan yang sangat diperlukan, terutama di lembaga-lembaga pemerintah. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Kabupaten Gunung Anyar sedang mengupayakan kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. Penerapan SAP basis akrual.
2. Dibuatkannya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) dan rencana kerja (RENJA) SKPD Kecamatan.
3. Mengikuti seminar yang berhubungan dengan tata ke pemerintahan.
4. Dibuatkannya visi misi demi terciptanya pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
5. Dibuatkannya standar operasional prosedur (SOP) pelayanan SKPD Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.
6. Tidak diperkenankan memberikan tip.
7. Menerapkan jargon “senyum, sopan, salam, santun, tegur, ramah tamah, dan sapa, karena bagi mereka itu adalah ibadah”.

Dari berbagai macam kegiatan atau bentuk upaya tersebut dalam mewujudkan *good governance*, terbukti Kecamatan Gunung Anyar Surabaya setiap tahunnya mencapai keberhasilannya dan hal ini ditunjukkan dengan berbagai prestasi atau penghargaan.

Berdasarkan penyajian data yang sudah peneliti sajikan tentang kegiatan apa saja yang dilakukan Kecamatan Gunung Anyar demi mewujudkan *good governance* patut dikembangkan dan dalam hal ini peran seorang Camat sangat penting mengingat beliau pemegang kekuasaan tertinggi di Kecamatan. Melalui wawancara peneliti dengan Ibu Fetty selaku KA Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian memaparkan bahwasanya Bapak Camat selalu memberikan perannya dalam berbagai hal termasuk untuk mewujudkan *good governance* khususnya dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan:

“Alhamdulillah didukung dengan baik, karena kan ini sudah kebijakan dari atasan dan sudah disiapkan juga perangkat lunaknya. In Syaa Allah pimpinan mendukung. Karena beliau sangat percaya pada stafnya dan pegawainya itu bisa menjalankan karena memang sudah didukung terutama dari BKD. Jadi pasti didukung dengan baik. Dan peran beliau di sini juga banyak dan penting sebagai Camat”

Dari pernyataan beliau sudah bisa menggambarkan bahwa kerja tim itu akan lebih baik dalam memberikan kontribusinya. Terlebih apabila hal itu akan dikaitkan dengan prinsip – prinsip *good governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi, berkeadilan, serta sesuai dengan aturan hukum, sesuai dengan pernyataan Bapak Dewanto sebagai berikut:

1) Akuntabilitas

“Akuntabilitas dimana kami seluruh pegawai berusaha sebaik mungkin dalam mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing, selain itu, setiap tahunnya kami selalu membuat LAKIP dan RENJA SKPD”.

Pernyataan di atas mengungkapkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk sebuah pertanggungjawaban yang dapat dikontrol melalui LAKIP dan RENJA SKPD Kecamatan Gunung Anyar Surabaya.

2) Transparansi

“Pada saat ini masyarakat umum bisa secara langsung dapat mengakses kinerja keuangan dan kinerja non keuangan pemerintah kota Surabaya melalui internet atau kalau data yang dibutuhkan belum ada di website tersebut, masyarakat bisa mengirim e-

mail dan langsung direspons melalui e-mail juga, akan tetapi itu hanya laporan keuangan secara menyeluruh dan untuk tiap-tiap Kecamatan tetap tidak diperlihatkan”.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini Pemerintah berusaha meningkatkan keterbukaan dari kinerja pemerintah secara teratur, tepat waktu serta benar. Walaupun untuk keuangan Kecamatan Gunung Anyar sendiri masih tidak dapat diperlihatkan.

3) Berkeadilan

“Dalam pelayanan kepada masyarakat tidak menunggu waktu yang lama. Kalau yang lalu-lalu waktunya sampai berminggu-minggu, sekarang “one day only” selesai. Karena begitu lama proses pengurusannya. Nah, sekarang di sini tidak ada istilah ini orangnya pejabat atau siapa dan itu orangnya siapa. Semuanya dilayani sama”.

Terlihat dari pernyataan tersebut bahwa Kecamatan Gunung Anyar melindungi segenap kepentingan masyarakat dan stakeholder lainnya dari rekayasa - rekayasa dan transaksi - transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku tanpa membedakan golongan mereka.

4) Sesuai Aturan Hukum

“Semua kebijakan yang di ambil oleh Pemerintah pasti dibuat payung hukumnya. Contoh penerapan SAP basis akrual yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Saat ini pada setiap Kecamatan ada kotak saran. Jadi setiap ada keluhan atau saran dari masyarakat ditampung untuk dapat dilaksanakan dan diperbaiki”.

Pernyataan tersebut sudah sangat menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang ada di Pemerintahan selalu ada hukumnya agar setiap tindakan mampu di pertanggung jawabkan.

Bapak Dewanto melalui wawancara menyatakan ada beberapa resolusi dalam mewujudkan *good governance*:

“Yang namanya revolusi itu sudah pasti ada dan hal tersebut dituangkan dalam LAKIP dan RENJA SKPD Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya yang pembuatannya satu kali dalam setahun dengan maksud sebagai dasar pijakan dalam pelaksanaan kegiatan maupun sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Kecamatan Gunung Anyar sebagai SKPD dan diharapkan pemerintah Birokrasi sebagai administrator negara mampu memberikan pertanggung jawaban kepada publik / masyarakat selaku stakeholders secara transparan atas kebijakan - kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan transparansi pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh seorang Administrator Negara dalam rangka menciptakan aparatur yang bersih, berwibawa, dan bebas KKN”.

Pada pernyataan tersebut jelas dikatakan bahwasanya Kecamatan Gunung Anyar Surabaya dalam tiap tahunnya selalu mempunyai perencanaan yang matang guna mewujudkan *good governance*, dengan dibuatkannya LAKIP dan RENJA pengelolaan kinerja menjadi terarah dengan baik.

Refleksi Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Manifestasi Good Governance

Untuk lebih memudahkan pemahaman akan refleksi standar akuntansi pemerintahan dilihat dari segi kompetensi sumber daya manusia dalam manifestasi *good governance* yang ada pada Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, maka ditabulasikan sebagai berikut:

Jadi berangkat dari semua aspek itu yang nantinya akan dikaitkan dengan prinsip – prinsip *good governance* diantaranya akuntabilitas, transparansi, berkeadilan, serta sesuai dengan aturan hukum sehingga dapat merefleksikan SAP dalam manifestasi *good governance* di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya.

Implementasi sistem akuntansi pemerintahan dalam manifestasi *good governance* sangat erat keterkaitannya dengan 4 (empat) prinsip *good governance* yaitu: akuntabilitas, transparansi, berkeadilan serta sesuai aturan hukum.

Akuntabilitas akan ditingkatkan jika akuntansi ditopang oleh sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu dan bebas dari kesalahan, yang pada dasarnya merupakan proses pencatatan transaksi keuangan secara sistematis yang konsisten dengan hukum yang berlaku, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta mengarah pada laporan yang digunakan oleh para pengguna untuk berbagai tujuan. Sebaliknya, sistem akuntansi yang sudah ketinggalan zaman, tidak informatif, tidak akurat dan menyesatkan melemahkan hubungan antara keadilan, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab.

Akuntansi sektor publik juga sangat relevan dengan kondisi reformasi saat ini di Indonesia dan kawasan regional. Reformasi sektor publik yang berhasil akan membutuhkan reformasi dalam akuntansi dan audit pemerintah. Jika kedua elemen ini tidak dilaksanakan, reformasi yang dilaksanakan di sektor publik bisa jadi hanya sebuah rekayasa. Bahkan, pilar-sistem pengetahuan yang diciptakan oleh akuntansi publik merupakan model bagi reformasi itu sendiri. Disebut cetak biru karena sistem akuntansi yang telah disatukan bukan lagi konsep yang mengambang, tetapi yang solid dan operasional.

Dalam rangka menghasilkan laporan akuntansi publik yang informatif, tepat waktu dan dapat dipercaya, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 71 tentang SAP akrual sebagai metode penerapan tata kelola yang baik dalam akuntansi publik, dan digunakan sebagai acuan penyusunan laporan akuntansi publik.

Standar tersebut harus mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan nasional sebagai hasil dari proses akuntansi, dengan pelaporan keuangan nasional yang digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mencapai pengelolaan keuangan nasional yang taat hukum, adil, transparan dan akuntabel. Pengenalan SAP diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan nasional.

Di Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, pelaporan keuangan pemerintah yang lebih komprehensif (neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan saldo anggaran lebih, laporan capaian anggaran dan catatan atas laporan keuangan) telah dilaksanakan melalui penerapan sistem SAP berbasis akrual. Pelaporan keuangan pemerintah lebih informatif, relevan, andal dan dapat dipahami sehingga masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah. Pelaporan keuangan pemerintah yang informatif, akuntabel, wajar dan taat hukum hanya akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang baik oleh pemerintah dan kemakmuran bangsa Indonesia itu sendiri.

Oleh karena itu, jelas bahwa SAP memiliki peran penting dalam pelaksanaan mandat masyarakat oleh pemerintah daerah dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Yang perlu ditingkatkan adalah transparansi informasi, terutama informasi keuangan dan akuntansi, yang disediakan dengan cara yang tepat dan mudah dipahami.

Salah satu tanggung jawab utama pengelolaan keuangan daerah adalah akuntabilitas keuangan.

Fungsi pelaporan keuangan yang biasanya dianggap dijalankan oleh pemerintah mengalami perubahan. Ini adalah laporan keuangan yang tepat yang mencerminkan semua kegiatan negara, menunjukkan posisi keuangan dan aset negara, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas semua dana yang diterima dari masyarakat.

Di Kecamatan Gunung Anyar, perhatian juga harus diberikan pada kurangnya pelatihan di masa depan untuk lebih meningkatkan kinerja sektor keuangan. Memang, standarisasi laporan keuangan pemerintah dapat membantu para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah. Terlepas dari beberapa kekurangan yang ada, Kecamatan Gunung Anyar Surabaya mampu memberikan pelayanan terbaik dari tahun ke tahun, terbukti dengan berbagai piala dan penghargaan yang telah diterimanya.

Oleh karena itu, secara keseluruhan, SAP berbasis akrual adalah cara manifestasi tata kelola pemerintahan yang baik dan, dalam keuangan publik, cara mengelola sumber daya melalui aturan hukum, transparansi, akuntabilitas, dan proses yang adil.

KESIMPULAN

Karakteristik laporan keuangan SAP basis akrual di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya sudah dapat dikatakan relevan, andal serta dapat dipahami. Namun, masih belum bisa dikatakan dapat dibandingkan dikarenakan kebijakan akuntansi yang diperbandingkan waktu itu masih

memakai basis kas sedangkan pada saat ini harus sudah memakai basis akrual.

Perubahan dari basis kas menjadi akrual di awal cukup memberatkan bagian keuangan yang ada dikarenakan latar belakang Pendidikan yang kurang memadai akan tetapi seiring berjalannya waktu mereka bisa menyesuaikan adanya penggunaan standar akuntansi pemerintahan tersebut. Sumber daya manusia yang ada cukup memegang peranan penting dalam hal ini. Kompetensi sumber daya manusianya dari aspek pengetahuan, ketrampilan, karakteristik pribadi serta pengalaman sudah cukup baik, akan tetapi apabila dilihat dari latar belakang pendidikan saja yang kurang memadai karena tidak sesuai dengan jabatan, hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi.

Perwujudan *good governance* yang terlihat di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya sudah bisa dikatakan berkeadilan serta sesuai aturan hukumnya. Akan tetapi untuk transparansinya hanya baik dalam bidang pelayanan dalam menyampaikan tanggapan dan kritik dari masyarakat. Sedangkan transparansi bidang keuangan masih menuju dikarenakan kinerja keuangan yang dapat diakses melalui internet hanya keuangan global Kota Surabaya saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, D., & Halim, A. (2021). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Penyusunan Laporan Keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*. 4(6). pp. 323-336.

- Basri, Y. M., Gusnardi., & Yasni, H. (2021). Government Budget Absorption: A Study on The Reallocation and Refocus of The COVID-19 Budget. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*. pp. 317- 337.
- Belinda, P. A., & Costari, N. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*. 1(1). pp. 58-77.
- Buhr, N. (2010). From Cash to Accrual and Domestic to International Government Accounting Standard Setting in Last 30 Years. *Sixth Accounting History International Conference; Welington*.
- Dewi, Y. A., Nasfi., & Yuliza, M. (2021). Internal Control System, Utilization Of Accounting Information Technology, On Village Fund Management Accountability. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*. 5(1). pp. 190-203.
- Halim, A. (2018). Akuntansi Sektor Publik. *Jakarta: Salemba Empat. Junjuran*,
- M. I., Asegaf, M. M., & Takwil, M.(2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan IGCG Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat. *Jurnal Akuntansi Integratif*. 6(2). pp. 112-125.
- Juwita, R. (2013). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Triekonomika*. 12(2). pp. 201–214.
- Kristiawati, E. (2015). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah Kalimantan Barat. 8(3). pp. 171-190.
- Lamonisi, S. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*. 4(1). pp. 223-230.
- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Behavioral Accounting Journal*. 3(1). pp. 1-20.
- Manosoh, H. (2015). Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan *Good Government Governance* Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 15(5).
- Mardiasmo. (2010). Akuntansi Sektor Publik. *Yogyakarta: Andi*.
- Moleong, L. J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*.
- Putra, S. A., & Varina, R. J. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*. 1(2).
- Rizky, H. P., & Setiawan, D. (2019). Perkembangan Penelitian Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*. 8(2). pp. 94-116.
- Sedarmayanti. (2012). Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” & Good Corporate Governance “Tata Kelola Perusahaan yang Baik”, *Bandung: CV. Mandar Maju*.

- Singkali, O. Y. F., & Widuri, R. (2014). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara. *TAX & Accounting Review*. 2(2).
- Sutrisno, E. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jakarta: Kencana*.
- Triyono., Achyani, F., & Arfiansyah, M. A. (2019). The Determinant Accountability of Village Funds Management (Study in The Villages in Wonogiri District). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia (REAKSI)*. 4(2). pp. 118-13.

Lampiran

Tabel 2
Komponen Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahann
dalam Mewujudkan *Good Governance*

Konsep Varibel	Dimensi	Indikator
1. Karakteristik Laporan Keuangan SAP Akrua	Relevan	Memiliki manfaat umpan balik
		Memiliki manfaat prediktif
		Tepat waktu
	Andal	Menyajikan informasi kepada pengguna yang nantinya akan diambil sebuah keputusan
		Adanya penilaian kinerja
Dapat dibandingkan	Belum dapat dibandingkan karena pada saat itu kebijakan akuntansi masih memakai basis kas	
Dapat dipahami	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan masih dalam tahap memahami para pengguna	
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (Bagian Keuangan)	Pengetahuan	Cukup baik walaupun masih ada yang belum dimengerti
	Latar belakang pendidikan	S1 Pertanian dan S2 Ilmu Administrasi Negara, tidak sesuai dengan jabatan sebagai bagian keuangan
	Ketrampilan	Baik
		Terbukti beliau sudah bekerja di Kecamatan Gunug Anyar sejak tahun 1998
		Selain bidang keuangan beliau juga memahami ilmu administrasi negara
Kepribadian	Baik	
	Penuh semangat	
	Ramah	
Pengalaman	Pernah bekerja selama 2 tahun dibidang yang sama di Bank BTPN	
3. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	Akuntabilitas	Menilai pertanggung jawaban dalam hal pelaksanaan dan pelaporan tepat waktu
		Proses pelaksanaan dan pelaporan tepat waktu
		Dibuatkannya LAKIP dan RENJASKPD setiap tahunnya
		Keterbukaan keuangan khususnya Kecamatan (kepada masyarakat masih kurang)
Konsep Varibel	Dimensi	Indikator

	Keterbukaan operasional apabila menyeluruh Kota Surabaya dapat diakses melalui internet
	Keterbukaan pengambilan keputusan
	Keterbukaan dalam penyampaian aspirasi dari masyarakat sudah baik
Berkeadilan	Dalam pelaksanaannya antara KA Sub Bagian Keuangan dengan bendahara tahap tugasnya adil tanpa membedakan
	Pengambilan keputusan demokratis
	Kebebasan pers dan berpendapat
	Keterlibatan masyarakat
Aturan Hukum	Sudah sesuai dengan peraturan pemerintah terbaru yakni PSAP nomor 71 tahun 2010 dan diterapkan sesuai dengan aturan pemerintah yakni pada tahun 2015.